El-Idare: Journal of Islamic Education Management, Vol 10, No 2, Tahun 2024
Avaliable Online At: http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/El-idare

Pengawasan Administrasi Kurikulim Merdeka Belajar Di MAN 2 Palembang

Geti Fitriani[1], Ahmad zainuri[2]
getifitriani@gmail.com[1], ahmadzainuri_uin@radenfatah.ac.id[2]
[1,2]Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Keyword
Administration, Merdeka Learning Curriculum, Education, Supervision

Article History

Submission	:	19-11-2024
Revised	:	16-12-2024
Publish	:	24-12-2024

Abstract
The implementation of the Merdeka Curriculum in Indonesia requires effective administrative supervision to ensure its successful execution in schools. Administrative supervision plays a crucial role in directing and monitoring various activities related to curriculum management, including planning, implementation, and evaluation. This study focuses on the administrative supervision of the Merdeka Curriculum at MAN 2 Palembang, aiming to explore the effectiveness of supervision and the challenges faced during its implementation process. The approach used in this research is qualitative-descriptive, with data collection through in-depth interviews, direct observation, and document analysis. The findings indicate that although administrative supervision at MAN 2 Palembang has been carried out well, several challenges remain, such as limited resources, a lack of understanding among teachers about the new curriculum, and the need for improved supervision quality. The use of technology in supervision has proven to enhance efficiency but has not yet been fully optimized. The conclusion of this study is that strengthening training for teachers, improving supervision quality, and fostering synergy between the school and the education office can be solutions to address these challenges. The implications of this research suggest the need for more attention to the development of curriculum supervisors' capacity and the use of technology as a tool for administrative supervision of the Merdeka Curriculum.

This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi kurikulum seiring dengan kebutuhan zaman dan tantangan global. Salah satu inovasi terbaru dalam dunia pendidikan adalah pengenalan Kurikulum Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendik-budristek) (Iskandar et al., 2023). Kurikulum ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dalam menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, konteks lokal, dan dinamika global (Al-faritzi, 2024). Berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang cenderung terstruktur ketat dan seragam, Kurikulum Merdeka Belajar menawarkan pendekatan berbasis proyek, penekanan pada pembentukan karakter, serta ruang untuk pengembangan kreativitas siswa. Kebijakan ini memberikan kebebasan kepada guru dalam menentukan metode pembelajaran yang relevan, dengan tetap mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditentukan (Muharnis & Fadriati, 2023).

Perkembangan Kurikulum Merdeka Belajar tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi pendidikan Indonesia, seperti kebutuhan untuk mencetak sumber daya manusia yang adaptif, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi era disrupsi teknologi (Andrea et al., 2024; Harmadi & Jatmiko, 2020). Pendekatan baru ini mengintegrasikan nilai-nilai kompetensi abad ke-21, seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Implementasinya dimulai secara bertahap pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dengan berbagai program pendukung, seperti *Platform Merdeka Mengajar*, pelatihan guru, dan penyediaan modul pembelajaran. Namun, kesuksesan Kurikulum Merdeka Belajar tidak hanya bergantung pada kebijakan dan materi ajar, tetapi juga pada kemampuan setiap sekolah untuk menerapkannya secara konsisten dan

efektif, termasuk melalui pengawasan administrasi yang sistematis.

Pengawasan administrasi memegang peranan penting dalam memastikan bahwa Kurikulum Merdeka Belajar dapat diimplementasikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Hassanah et al., 2024; Mafdu & Islam, 2024). Pengawasan administrasi tidak hanya mencakup pengelolaan dokumen, seperti perencanaan pembelajaran, penilaian, dan pelaporan, tetapi juga melibatkan *monitoring* dan evaluasi proses serta hasil pembelajaran. Sebagai tulang punggung sistem pendidikan, administrasi yang tertata baik memungkinkan adanya sinkronisasi antara kebijakan nasional dan praktik di lapangan. Melalui pengawasan yang baik, sekolah dapat mengidentifikasi kendala, mengevaluasi capaian, serta menyusun strategi perbaikan untuk mendukung keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka (Wuwur, 2023). Pengawasan juga berfungsi sebagai alat kontrol kualitas untuk memastikan bahwa setiap elemen pendidikan, mulai dari guru hingga sarana dan prasarana, berfungsi optimal dalam mendukung proses pembelajaran.

Dalam konteks MAN 2 Palembang, pengawasan administrasi memiliki relevansi yang khusus. Sebagai salah satu madrasah aliyah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, MAN 2 Palembang memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar, tetapi juga mengintegrasikannya dengan nilai-nilai keislaman. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat pendidikan Islam memiliki kekhasan dalam menanamkan moral, etika, dan akhlak mulia kepada peserta didik. Pengawasan administrasi di MAN 2 Palembang harus mampu memastikan bahwa pembelajaran yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter Islami yang sejalan dengan visi dan misi madrasah.

Sebagai institusi pendidikan Islam yang memiliki rekam jejak unggul di wilayah Sumatera Selatan, MAN 2 Palembang memainkan peranan strategis dalam mencetak generasi muda yang kompeten secara intelektual, spiritual, dan emosional. Oleh karena itu, pengawasan administrasi di madrasah ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi kurikulum, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga kualitas pendidikan berbasis Islam yang mampu bersaing di era modern. Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di MAN 2 Palembang melibatkan adaptasi nilai-nilai Islam dalam setiap aspek pembelajaran, seperti integrasi materi keislaman dengan proyek pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*) yang menjadi ciri khas Kurikulum Merdeka.

Pengawasan administrasi di MAN 2 Palembang mencakup berbagai dimensi, mulai dari perencanaan pembelajaran yang berbasis proyek, pelaksanaan penilaian autentik, hingga pelaporan yang sesuai dengan standar Kementerian Agama. Setiap tahapan memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa proses yang berlangsung sejalan dengan tujuan Kurikulum Merdeka. Selain itu, pengawasan juga diperlukan untuk mendeteksi hambatan, seperti kurangnya pemahaman guru terhadap kurikulum baru, keterbatasan sarana pendukung, atau resistensi terhadap perubahan. Dalam hal ini, pengawasan administrasi menjadi instrumen penting untuk mendukung kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan peran mereka secara efektif.

Keberhasilan pengawasan administrasi di MAN 2 Palembang tidak hanya memberi-kan dampak pada pelaksanaan kurikulum di madrasah tersebut, tetapi juga dapat menjadi model bagi madrasah lain di Indonesia. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis data, MAN 2 Palembang dapat menunjukkan bagaimana pengawasan yang baik mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta berdaya saing global.

Urgensi pembahasan ini semakin relevan di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah. Kurikulum Merdeka Belajar menawarkan peluang besar bagi madrasah untuk memperbaiki sistem pembelajaran mereka, namun hal ini harus didukung oleh pengawasan administrasi yang kuat dan sistematis. Tanpa pengawasan yang memadai, potensi dari Kurikulum Merdeka Belajar mungkin tidak dapat dimaksimalkan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi celah pengetahuan dalam literatur pendidikan terkait

pengawasan administrasi di madrasah, khususnya dalam konteks Kurikulum Merdeka Belajar di MAN 2 Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengawasan administrasi Kurikulum Merdeka di MAN 2 Palembang serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan memberikan rekomendasi solusi yang tepat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis pengawasan administrasi Kurikulum Merdeka di MAN 2 Palembang. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam proses pengawasan, kendala yang dihadapi, serta solusi yang diterapkan oleh pihak sekolah. Lokasi penelitian adalah MAN 2 Palembang, yang dipilih karena telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dalam proses pembelajarannya. Informan penelitian meliputi kepala sekolah, wakil kepala bidang kurikulum, guru, dan staf administrasi. Mereka dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengawasan dan pelaksanaan kurikulum. Data dikumpulkan melalui tiga metode utam, yaitu wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi langsung dari informan, observasi langsung untuk melihat praktik pengawasan, dan studi dokumentasi untuk menelaah dokumen-dokumen terkait administrasi kurikulum.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019). Reduksi data dilakukan dengan memilah data yang relevan dan signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk menggambarkan temuan secara sistematis dan terstruktur. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pola-pola temuan yang muncul, di mana validitas data dijaga melalui triangulasi teknik dan sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi informasi (Rukin, 2021). Proses ini bertujuan untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif mengenai pengawasan administrasi Kurikulum Merdeka di MAN 2 Palembang, serta memberikan rekomendasi solusi yang aplikatif.

PEMBAHASAN

Proses Pengawasan Administrasi Kurikulum Merdeka Belajar

Pengawasan administrasi Kurikulum Merdeka di MAN 2 Palembang dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang sistematis. Pada tahap perencanaan, sekolah menyusun program kerja pengawasan administrasi yang mencakup pengaturan jadwal supervisi, penetapan indikator keberhasilan, serta penyusunan prosedur pengawasan yang mendetail. Kepala sekolah bersama tim wakil kepala kurikulum memainkan peran utama dalam memastikan bahwa program pengawasan sesuai dengan pedoman implementasi Kurikulum Merdeka yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, pelatihan awal untuk guru dan staf administrasi dilakukan untuk memperkuat pemahaman mereka tentang aspek teknis dan administratif kurikulum tersebut.

Tahap pelaksanaan pengawasan melibatkan aktivitas pemantauan langsung oleh kepala sekolah dan tim pengawas. Mereka meng-observasi pelaksanaan administrasi kurikulum, seperti penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), catatan kegiatan belajar-mengajar, dan laporan evaluasi pembelajaran. Kepala sekolah memastikan bahwa dokumen-dokumen ini disusun sesuai dengan prinsip fleksibilitas dan *personalisasi* pembelajaran, sebagaimana yang diamanatkan oleh Kurikulum Merdeka. Selama proses *monitoring*, ditemukan bahwa sebagian besar guru sudah mampu menyusun dokumen yang sesuai, meskipun beberapa masih memerlukan pendampingan terkait teknis penyusunan rencana pembelajaran berbasis proyek. Pengawasan ini dilakukan secara berkala melalui pertemuan mingguan untuk membahas temuan lapangan dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada guru dan staf administrasi.

Sistem pengelolaan dokumen dan *monitoring* implementasi Kurikulum Merdeka di MAN 2 Palembang telah dirancang secara digital untuk meningkatkan efisiensi. Penggunaan aplikasi manajemen pendidikan membantu dalam pengarsipan dokumen kurikulum, seperti modul pembelajaran, catatan absensi siswa, dan laporan hasil belajar. Sistem ini memungkinkan pengawas untuk memonitor perkembangan implementasi

kurikulum secara *real-time* dan memberikan laporan yang akurat kepada kepala sekolah. Kendati demikian, masih ada kendala dalam adopsi teknologi, terutama bagi staf administrasi yang kurang terbiasa dengan sistem digital. Untuk mengatasi hal ini, pihak sekolah menyediakan pelatihan khusus tentang pengoperasian sistem digital tersebut.

Tahap evaluasi dilakukan melalui analisis data hasil *monitoring* untuk mengukur efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka. Kepala sekolah bersama tim kurikulum mengevaluasi sejauh mana dokumen administrasi telah mencerminkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka, seperti pembelajaran berbasis kompetensi dan penguatan karakter siswa. Selain itu, evaluasi juga melibatkan pengumpulan umpan balik dari guru dan siswa untuk memahami kendala yang dihadapi di lapangan. Dari evaluasi ini, ditemukan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas bagi guru dalam merancang pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa, tetapi membutuhkan peningkatan dalam koordinasi antar-*stakeholder* untuk memastikan kelancaran administrasi.

Secara keseluruhan, pengawasan administrasi Kurikulum Merdeka di MAN 2 Palembang menunjukkan upaya yang signifikan dalam memastikan implementasi kurikulum berjalan sesuai standar. Meskipun ada tantangan, seperti kurangnya keterampilan teknologi di kalangan staf administrasi dan kompleksitas pengelolaan dokumen, langkah-langkah strategis telah diambil untuk mengatasi hambatan tersebut. Penggunaan teknologi digital dan pendekatan berbasis kolaborasi antara pengawas, guru, dan staf administrasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan administrasi Kurikulum Merdeka di MAN 2 Palembang. Temuan ini memberikan gambaran penting bahwa pengawasan administrasi yang baik bukan hanya tentang kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.

Tantangan dan Kendala Pengawasan Administrasi Kurikulum Merdeka Belajar

Dalam pelaksanaan pengawasan administrasi Kurikulum Merdeka di MAN 2 Palembang, sejumlah tantangan dan kendala muncul yang mempengaruhi efektivitas pengawasan tersebut. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas yang tersedia. Meskipun sekolah telah berupaya mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara optimal, jumlah pengawas yang terbatas mengakibatkan pengawasan yang tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Pengawasan administrasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum memerlukan keterlibatan banyak pihak, termasuk kepala sekolah, wakil kepala kurikulum, guru, dan staf administrasi. Namun, dengan keterbatasan jumlah personel yang bertugas di bidang administrasi dan pengawasan, beberapa proses administrasi tidak dapat dipantau secara rinci dan mendalam. Selain itu, fasilitas yang ada, seperti ruang untuk pelatihan, alat bantu pengawasan, serta sarana teknologi informasi yang memadai, juga sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan. Keterbatasan fasilitas ini membatasi kemampuan pengawas untuk memantau proses pembelajaran secara *real-time* dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk evaluasi pengajaran secara akurat.

Kendala kedua yang ditemukan adalah pemahaman yang belum merata di kalangan guru dan staf mengenai Kurikulum Merdeka. Walaupun Kurikulum Merdeka menuntut adanya perubahan paradigma dalam pembelajaran, tidak semua guru dan staf memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang konsep dan tujuan kurikulum tersebut. Beberapa guru masih terjebak dalam cara-cara lama dalam mengelola kelas dan menyusun administrasi kurikulum, yang menghambat implementasi kurikulum yang sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar. Misalnya, dalam hal pengelolaan materi ajar, meskipun Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan dalam memilih dan menyusun materi, banyak guru yang masih merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis proyek. Kurangnya pelatihan yang berkesinambungan dan pembaruan informasi terkait Kurikulum Merdeka menjadi penyebab tidaksiapan sebagian guru dalam mengimplementasikan kurikulum dengan baik. Hal ini juga berimbas pada kurangnya keterampilan dalam menyusun administrasi pembelajaran yang sesuai dengan standar Kurikulum Merdeka, seperti penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang

lebih berbasis pada kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran yang lebih inklusif.

Koordinasi antar-*stakeholder* dalam proses pengawasan juga menjadi tantangan besar dalam penerapan Kurikulum Merdeka di MAN 2 Palembang. Pengawasan yang efektif memerlukan kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang terlibat, seperti kepala sekolah, wakil kepala kurikulum, guru, dan staf administrasi. Namun, komunikasi dan koordinasi antar-*stakeholder* sering kali tidak berjalan lancar. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya forum atau wadah untuk berdiskusi secara rutin mengenai perkembangan pelaksanaan kurikulum dan masalah yang dihadapi dalam pengawasan administrasi. Kepala sekolah dan wakil kepala kurikulum sering kali terhambat oleh waktu dan kesibukan administrasi lainnya yang membuat mereka sulit untuk memonitor secara langsung semua aspek pengawasan kurikulum. Selain itu, kurangnya pemahaman yang sama mengenai tujuan pengawasan administrasi dari setiap *stakeholder* turut memperburuk koordinasi. Guru, sebagai pelaksana utama dalam proses pembelajaran, kadang merasa bahwa pengawasan administrasi lebih bersifat administratif dan tidak langsung berhubungan dengan proses belajar-mengajar yang mereka jalani. Hal ini menyebab-kan pengawasan yang seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran justru dianggap sebagai beban administratif yang menambah pekerjaan tanpa memberikan dampak yang signifikan.

Selain itu, pengawasan yang dilakukan secara sporadis dan tidak terkoordinasi dengan baik mengurangi efektivitas evaluasi terhadap implementasi Kurikulum Merdeka. Tanpa adanya komunikasi yang jelas antara pengawas, guru, dan staf administrasi, hasil pengawasan yang diperoleh seringkali tidak memberikan gambaran yang utuh mengenai kualitas pengajaran dan administrasi yang telah diterapkan. Koordinasi yang kurang ini juga menghambat proses penyusunan rencana tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala yang ditemukan dalam pengawasan administrasi.

Secara keseluruhan, tantangan dan kendala ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam beberapa aspek, seperti peningkatan SDM pengawas, pelatihan berkelanjutan untuk guru dan staf, serta penguatan koordinasi antar-*stakeholder* dalam proses pengawasan. Tanpa penyelesaian terhadap masalah-masalah ini, pengawasan administrasi Kurikulum Merdeka di MAN 2 Palembang akan sulit mencapai hasil yang optimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Upaya dan Solusi Pengawasan Administrasi Kurikulum Merdeka Belajar

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan administrasi Kurikulum Merdeka di MAN 2 Palembang, beberapa langkah strategis telah diidentifikasi, antara lain penguatan pelatihan dan pendampingan bagi guru dan staf, peningkatan kualitas supervisi, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan. Salah satu solusi utama yang diterapkan adalah penguatan pelatihan dan pendampingan bagi guru dan staf. Pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang Kurikulum Merdeka, terutama terkait dengan perubahan dalam pendekatan pembelajaran yang berbasis pada proyek dan penguatan kompetensi siswa. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis kurikulum, tetapi juga pada peningkatan keterampilan manajerial dan administrasi, seperti penyusunan RPP (Rencana Pelaksana-an Pembelajaran) yang berbasis pada prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Selain itu, pendampingan yang diberikan oleh pengawas kurikulum selama pelaksanaan kurikulum sangat membantu guru dalam mengatasi tantangan di lapangan. Para guru dapat berkonsultasi secara langsung mengenai permasalahan yang mereka hadapi, seperti kesulitan dalam merancang pembelajaran yang inovatif atau keterbatasan dalam pengelolaan kelas.

Selain pelatihan, peningkatan kualitas supervisi juga menjadi salah satu fokus utama dalam pengawasan administrasi. Supervisi yang dilakukan di MAN 2 Palembang tidak hanya sebatas pada penilaian administratif, tetapi juga mencakup pendalaman kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan keterampilan para pengawas dalam memberikan *feedback* yang konstruktif dan membangun, sehingga dapat mendukung perbaikan kualitas pengajaran. Pengawasan yang dilakukan secara berkala dan terstruktur memungkinkan untuk melakukan deteksi dini terhadap masalah yang mungkin

muncul selama implementasi Kurikulum Merdeka. Dengan adanya supervisi yang lebih intensif dan mendalam, diharapkan kualitas pembelajaran dapat meningkat dan pelaksanaan kurikulum menjadi lebih optimal. Hal ini juga mencakup evaluasi terhadap administrasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru, termasuk pengelolaan bahan ajar, penilaian, dan dokumentasi yang sesuai dengan standar Kurikulum Merdeka.

Pemanfaatan teknologi menjadi solusi lain yang sangat relevan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan administrasi. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memper-mudah pengumpulan, analisis, dan pelaporan data terkait pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah. Platform berbasis digital yang digunakan untuk menyusun RPP, mengelola tugas dan evaluasi siswa, serta melakukan pelaporan perkembangan pembelajaran dapat membantu mempercepat proses administrasi dan pengawasan. Dengan adanya teknologi, pengawas dan kepala sekolah dapat lebih mudah memonitor implementasi kurikulum secara *real-time* dan memberikan umpan balik yang lebih cepat. Selain itu, teknologi juga memungkinkan penyimpanan dan pemprosesan data yang lebih efisien, mengurangi ketergantungan pada administrasi manual yang rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan. Pemanfaatan aplikasi atau platform yang mendukung kolaborasi dan komunikasi antar guru, staf, dan pengawas akan mempercepat pertukaran informasi dan koordinasi yang lebih baik dalam pengawasan administrasi.

Sinergi antara pihak sekolah dan dinas pendidikan juga merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam meningkatkan keberhasilan pengawasan administrasi Kurikulum Merdeka. Kolaborasi yang erat antara pihak sekolah dan dinas pendidikan dapat memperkuat implementasi kurikulum di lapangan. Dinas pendidikan berperan dalam memberikan dukungan kebijakan, pengalokasian sumber daya, serta *monitoring* dan evaluasi yang lebih menyeluruh terhadap pelaksanaan kurikulum. Melalui kerjasama yang baik, diharapkan kendala yang dihadapi oleh sekolah, seperti keterbatasan fasilitas atau kurangnya tenaga pendidik yang terlatih, dapat teratasi dengan baik. Selain itu, sinergi ini memungkinkan adanya penyelarasan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga kurikulum yang diterapkan dapat lebih relevan dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. Keterlibatan aktif dari dinas pendidikan dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada sekolah, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, akan sangat mendukung kelancaran pengawasan administrasi dan implementasi Kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, perlu ada komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik antara kedua pihak agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan optimal.

Dengan demikian, penguatan pelatihan dan pendampingan, peningkatan kualitas supervisi, pemanfaatan teknologi, serta sinergi antara pihak sekolah dan dinas pendidikan merupakan solusi yang saling mendukung untuk memperbaiki pengawasan administrasi Kurikulum Merdeka di MAN 2 Palembang, guna memastikan implementasi kurikulum yang efektif dan berkualitas.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan administrasi yang terstruktur sangat penting untuk keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Pengawasan yang efektif dapat memastikan bahwa semua aspek administrasi, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Temuan utama penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun pengawas-an administrasi di MAN 2 Palembang telah dilaksanakan dengan baik, terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman sebagian guru terhadap kurikulum merdeka, dan masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pengawasan administrasi. Tantangan-tantangan ini mempengaruhi efektivitas pengawasan dan pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas pengawasan administrasi. Pertama, pihak sekolah diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pengawas kurikulum melalui pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif, sehingga mereka dapat memberikan supervisi yang lebih efektif kepada guru. Kedua, pengembangan sistem evaluasi yang lebih komprehensif diperlukan agar dapat memantau

perkembangan implementasi kurikulum secara menyeluruh dan akurat, serta memberikan umpan balik yang tepat waktu. Ketiga, dinas pendidikan diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam memberikan dukungan teknis dan kebijakan yang memperkuat pengawasan di tingkat sekolah, seperti penyediaan sarana prasarana, pengembangan kurikulum berbasis digital, dan pelatihan untuk pengawas dan guru. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengawasan administrasi Kurikulum Merdeka di MAN 2 Palembang dapat lebih optimal dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-faritzi, Z. S. Y. (2024). Merdeka Belajar untuk Mewujudkan Sekolah yang Berkualitas. *DINAMIKA EKONOMI : Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, *15*(2), 78–87. https://doi. org/10.29313/jde.v15i2.3976

Andrea, J., Sakinah, F., Gistituat, N., & Hardiyantot. (2024). Merdeka Belajar Dalam Revolusi Pendidikan Indonesia Di Era Disrupsi. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *9*(2), 7158–7175. https://doi.org/10.23969/jp.v9i2.15021

Harmadi, M., & Jatmiko, A. A. (2020). Pembelajaran Efektif Pendidikan Agama Kristen Generasi Milenial. *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, *16*(1), 62–74. https://doi.org/10.46494/psc. v16i1.72

Hassanah, I., Pratidina, I., Untari, S., Sumardjoko, B., & Ati, E. F. (2024). Peran Supervisi dalam Pelaksanaan Kurikulum untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, *13*(2), 2119–2130. https://doi.org/10.58230/ 27454312.669

Iskandar, S., Rosmana, P. S., Apriliani, D., Husna, M., Azahra, R., & Zahra, V. N. (2023). Kurikulum Merdeka Sebagai Upaya Mengatasi Learning Loss yang Terjadi di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(2), 3558–3568.

Mafdu, & Islam, M. H. (2024). Supervisi Kepala Madrasah pada Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Menengah Pertama Badridduja Full Day School. *Jurnal Kewarganegaraan*, *8*(1), 210–224. https://doi.org/10.31316/jk. v8i1.6090

Muharnis, & Fadriati. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Nasional. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, *6*(1), 49–59. https://doi.org/10.31764/pendekar.v6i1.126 77

Rukin. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wuwur, E. S. P. O. (2023). Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar. *SOKO GURU: Jurnal Ilmu Pendidikan*, *3*(1), 1–9. https://doi.org/ 10.55606/sokoguru.v3i1.1417